

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus dan Elvany, Ayu Izza. *Hukum Pidana Lingkungan*. (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016).

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011).

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Semarang: Fajar Interpretama, 2011).

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. (Bandung: Citra Bakti, 2005).

Kaplan, John. *Criminal Justice*. (New York: The Foundation Press Inc. Mineola, 1973).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. *Statistik Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018*. (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Marlina, *Hukum Penitensier*. Cetakan Pertama. (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

_____. *Penelitian Hukum (b)*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

_____. *Penelitian Hukum (a)*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017)

Meijaard, Erik. Sheil, Douglas. Nasi, Robert. Augeri, David. Rosenbaum, Barry. Iskandar, Djoko. Setyawati, Titiek. Lammertink, Martjan. Rachmatika, Ike. Wong, Anna. Soehartono, Tonny. Stanley, Scott. Gunawan, Tiene. O'Brien, Timothy. *Hutan Pasca Pemanenan Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan*. (Bogor: Center for International Forestry Research, 2006).

Mulyadi Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2008).

Muladi. dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. (Bandung: Alumni, 1992).

Remmelik, Jan. *Hukum Pidana - Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta, Erlangga, 2004).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986).

B. Perundang-undangan dan Traktat

Washington D.C. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. (1973).

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*”, yang telah ditandatangani di Washington Pada Tanggal 3 Maret 1973, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini.

_____. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 **tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi**.

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Jurnal

Anonim. "Aturan Dan Ketentuan CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*) Terkait Ramin Dan Jenis Tumbuhan Lainnya".

AR, Suhariyono. "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Vol. XVII. No. 1. Tahun 2012.

AR, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Piana dalam Suatu Undang-Undang". Vol. 6. No. 4.

D. Makalah/ Artikel

Anonim. *Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade*. [https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/stop_illegal_wildlife_t
rade/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/stop_illegal_wildlife_trade/). WWF Indonesia.

Maharani, Tsarina. Detiknews. "Menteri LHK: Kejahatan Satwa Liar Peringkat Ke-3 di Indonesia". [https://news.detik.com/berita/d-
3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia](https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia).